



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Diplomasi Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam
Permasalahan *Comfort Women*

Skripsi

Oleh

Dharmawati Dwi Martiani

2017330052

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Diplomasi Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam
Permasalahan *Comfort Women*

Skripsi

Oleh

Dharmawati Dwi Martiani

2017330052

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dharmawati Dwi Martiani
Nomor Pokok : 2017330052
Judul : Diplomasi Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam
Permasalahan *Comfort Women*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 25 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.:

Sekretaris

Sukawarsini Djelantik, Ph.D. :

Anggota

Ratih Indraswari, S.IP., MA :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dharmawati Dwi Martiani

NPM : 2017330052

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Diplomasi Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam Permasalahan
Comfort Women

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Januari 2021



Dharmawati Dwi Martiani

ABSTRAK

Nama : Dharmawati Dwi Martiani

NPM : 2017330052

Judul : Diplomasi Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam Permasalahan *Comfort*

Women

Comfort women atau padanan dalam Bahasa Indonesia yaitu budak seks, merupakan salah satu permasalahan yang mempengaruhi kestabilan hubungan diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan. Permasalahan budak seks dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, yaitu sejak tahun 1945 hingga sekarang, karena adanya perbedaan pandangan dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan menggunakan konsep politik luar negeri, diplomasi, diplomasi bilateral, dan diplomasi permintaan maaf, penelitian ini akan membahas bagaimana upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam menyelesaikan permasalahan budak seks. Permasalahan ini merupakan penyebab terhambatnya kerjasama Jepang dengan Korea Selatan, baik dalam bidang ekonomi, keamanan, maupun budaya. Sehingga diperlukan adanya upaya diplomasi dari Jepang untuk melanjutkan kerjasama. Puncak dari upaya diplomasi bilateral Jepang yakni *Agreement on Comfort Women* atau Kesepakatan Perbudakan Seks pada 28 Desember 2015, yang telah disepakati oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis upaya - upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan setelah Kesepakatan Perbudakan Seks 2015 disepakati, hingga 9 Januari 2018 saat Korea Selatan secara sepihak membatalkan perjanjian, sekaligus menjadi temuan yang paling penting dari penelitian ini. Keterlibatan peran dari media massa di Jepang dan Korea Selatan pun, turut ikut serta dalam upaya diplomasi Jepang untuk menyelesaikan permasalahan budak seks terhadap Korea Selatan. Diplomasi yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan dalam permasalahan budak seks, merupakan salah satu upaya Shinzo Abe untuk memenuhi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan citra Jepang di komunitas Internasional.

Kata kunci: diplomasi Jepang, *comfort women*, perbudakan seks, Kesepakatan Perbudakan Seks 2015, Shinzo Abe

ABSTRACT

Name : Dharmawati Dwi Martiani

NPM : 2017330052

Title : *Japanese Diplomacy Towards South Korea On Comfort Women Issues*

Comfort women or in Indonesian, called sex slaves, is one of the issue that affects the stability of Japanese diplomatic relations with South Korea. The sex slaves' issue began when World War II ended from 1945 until now, because of the differences perspectives from Japan and South Korea. Using the concepts of foreign policy, diplomacy, bilateral diplomacy, and apology diplomacy, this study will discuss how Japanese diplomacy attempts to South Korea in solving the sex slave issue. This issue is the cause of cooperation constrain between Japan and South Korea, in the economic, security and cultural sectors. Therefore, diplomatic efforts from Japan are needed in order to continue the cooperation. The key point of Japan's bilateral diplomacy efforts is the Agreement on Comfort Women or the Sex Slave Agreement on December 28, 2015, which was agreed by Japanese Prime Minister Shinzo Abe and South Korean President Park Geun Hye. The method used in this research is qualitative method. The purpose of this study is to analyze Japan's diplomatic efforts towards South Korea after the 2015 Sex Slave Agreement, until January 9 2018 when South Korea unilaterally canceled the agreement, which is also the most important point of this research. The involvement of the mass media in Japan and South Korea has also participated in Japanese diplomacy to solve sex slaves issue towards South Korea. Japanese diplomacy towards South Korea on sex slave issue is one of Shinzo Abe's efforts to fulfill domestic interests and improve Japan's image in the international community.

Keywords: Japanese diplomacy, comfort women, sex slaves, Agreement on Comfort Women 2015, Shinzo Abe

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan umatNya atas karunia, rahmat, dan keridhaanNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah peneliti rencanakan. Dalam kesepakatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sukawarsini Djelantik yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi. Ucapan terima kasih pun penulis sampaikan kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan para teman – teman yang turut mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi.

Skripsi yang penulis ajukan berjudul “**Diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan Dalam Permasalahan *Comfort Women***” dibuat untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dalam Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya tulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis senantiasa untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis mengharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menyumbangkan ilmu Hubungan Internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Allah SWT beserta malaikat dan utusan - utusanNya yang sudah mengizinkan saya dalam mengambil skripsi ini dan mendengarkan keluh kesah dalam doa saya. Serta memberikan selalu memberikan saya kesehatan dan perlindunganNya dalam segala aktivitas saya, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kedua saya ingin berterima kasih kepada keluarga yang saya amat sayangi:

Mamah, Ayah, Aa, Kak Djasmine, Dede, Mimih, Pipih dan semua keluarga dari pihak Mamah maupun Ayah, yang sudah mendukung saya baik dalam segi mental maupun material, dalam bidang akademik maupun diluar bidang akademik. Terima kasih sebanyak dan sedalam-dalamnya, karena tanpa dukungan dan kehadiran keluarga, saya tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu.

Lalu terima kasih kepada Mbak Sukawarsini Djelantik Dra., M.I.S., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing:

Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang membangun dari Mbak Suke, untuk skripsi saya yang tentunya masih banyak kesalahan dan dibutuhkan perbaikan dari yang seseorang sudah ahli terhadap topik skripsi saya ini, yaitu diplomasi.

Terima kasih kepada jajaran dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan:

Tanpa adanya sumbangan dan pemberian ilmu dari para dosen HI, tentunya saya tidak bisa merumuskan topik skripsi saya ini dan mengambil mata kuliah skripsi dengan tepat waktu.

Terima kasih kepada Azenia Tamara Davina:

Sahabat yang lebih dekat dari saudara kandung sendiri, yang senantiasa ada disaat setiap situasi, yang selalu mendengar keluh kesah dan menemani selama mengerjakan skripsi, yang mempunyai peran besar terhadap penyelesaian skripsi Tia, yaitu dengan memberikan saran dan kritikan yang sangat membangun, maupun juga cerita mengenai kehidupan sehari - hari. Dari yang kenal dari konser *Wings Tour 2017* karena ketidaksengajaan, sampai sekarang menjadi *personal human diary*, Alhamdulillah bisa selalu tau perjalanan satu sama lain dari sebelum menjadi mahasiswa baru hingga sekarang sama-sama menyelesaikan skripsi dan menuju lulus. Begitu juga dengan *Azura Muthiah*, sahabat Tia yang tidak kalah dekat, sekaligus sepupu *Azenia*, yang juga selalu mendukung Tia secara penuh dalam menyelesaikan skripsi dan sidang.

Terima kasih kepada teman-teman MAKO (Mayang Kopo):

Jessica Ramadhany; Theovilia Siregar; Shania Adera; Mayang Alya; Sekarrayi Junio; Shania Megarani;

Terima kasih untuk enam cewek-cewek yang udah selalu menemani selama di kampus dan juga di luar kampus, selalu mendukung dan menyamangati untuk menyelesaikan skripsi dan sidang, yang mempunyai peran tidak kalah besar dari keluarga.

Terima kasih kepada Raden Naufal Daffa Adlyono:

Yang sudah selalu mendengarkan keluh kesah Tia ketika mengerjakan skripsi, memberikan masukan dan kritikan untuk isi skripsi dan sidang, yang selalu berjuang bareng dalam perjalanan yang panjang untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih banyak wahai pergembelan! *Lets go* kita makan - makan bareng lagi!

Tanpa dukungan dan doa dari nama - nama maupun pihak - pihak yang disebutkan, peneliti tentunya tidak akan berada dalam posisinya sekarang dan kemungkinan tidak akan menyelesaikan skripsi dan lulus sesuai dengan rencana yang diinginkan. Terima kasih yang sebesar - besarnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.2.1. Pembatasan Masalah	11
1.2.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	12
1.4. Tinjauan Pustaka	13
1.5. Kerangka Pemikiran	18
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.7. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
2.1. Sejarah Hubungan Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam Permasalahan <i>Comfort Women</i>	24
2.1.1. Okupasi Sistem <i>Comfort Women</i> Jepang di Korea Selatan.....	25
2.2. Sikap Pemerintah Jepang Terhadap Korea Selatan Dalam Menanggapi Permasalahan <i>Comfort Women</i>	30

2.2.1 Pemerintahan Jepang Sebelum Masa Pemerintahan Shinzo Abe Tahun 1991 - 2006.....	31
2.2.2. Masa Pemerintahan Shinzo Abe Tahun 2006 - 2007	36
2.3. Pengaruh Permasalahan <i>Comfort Women</i> Terhadap Hubungan Jepang Dengan Korea Selatan	38
2.3.2. Perbedaan Jepang dan Korea Selatan Dalam Memandang Permasalahan <i>Comfort Women</i>	39
2.4. Faktor-Faktor Yang Mendorong Jepang Berdiplomasi Terhadap Korea Selatan Dalam Permasalahan <i>Comfort Women</i>.....	41
2.4.1. Tekanan Dalam Negeri Jepang	42
2.4.2. Tuntutan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat.....	43
BAB III.....	46
3.1. Meminta Maaf dan Menandatangani Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan <i>Comfort Women</i> Tahun 2015	46
3.2. Menolak Tuntutan Kembali yang Dilakukan oleh Korea Selatan Mengenai Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan <i>Comfort Women</i>.....	54
3.2.1. Desakan Relokasi Patung <i>Comfort Women</i> Sebagai Simbol Protes di Busan oleh Jepang	60
3.3. Bekerjasama dengan Media Massa di Jepang dan Korea Selatan.....	62
3.3.1. Media Massa di Jepang	63
3.3.2. Media Massa di Korea Selatan	65
BAB IV	69
KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Iklan Asian Women’s Fund di surat kabar Korea Selatan	34
Gambar 2.2. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye pada Pertemuan Tingkat Tinggi Trilateral di Seoul, Korea Selatan.	49
Gambar 3.1. Patung perbudakan seks sebagai simbol protes di depan kantor Konsulat Jenderal Jepang di Busan, Korea Selatan_	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perkiraan Jumlah Budak Seks.....	29
---	----

DAFTAR SINGKATAN

- KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
- PBB : Perserikatan Bangsa – Bangsa
- UNESCO : *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara yang berada pada satu kawasan yaitu Asia Timur. Namun hubungan kedua negara mengalami ketegangan yang berkepanjangan, akibat adanya permasalahan latar belakang sejarah. Diawali pada tahun 1894 – 1895, kemenangan Jepang dalam perang pertama Tiongkok – Jepang dan pada tahun 1904 – 1905 antara Rusia dan Jepang, merupakan salah satu puncak yang menjadikan Jepang sebagai kekuatan terbesar imperialis baru di Asia Timur dan menjadikan dorongan bagi Jepang untuk melakukan ekspansi ke berbagai negara di Asia. Pada abad ke-19, Jepang yang masih bersama Jerman dan Italia, berusaha untuk mengejar posisinya terhadap bangsa Barat dalam membangun bangsa koloninya sendiri. Dalam waktu yang bersamaan, bangsa Eropa pun masih tertinggal dalam menguasai Afrika dan hanya sebagian dari Asia yang baru dikuasai oleh mereka pada saat itu. Sehingga mempermudah Jepang untuk mewujudkan ambisinya, yakni untuk menguasai Asia Timur secara keseluruhan terutama secara geografis.¹

Jepang mewujudkan ambisinya tersebut melalui kekuatan imperialismenya dan apa yang dinamakan dengan *the Greater East Asia Co-prosperity Sphere*. Bagi Jepang, mekanisme tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam pan-Asianisme, yang dianggap bahwa ekspansi kekuatan imperialisme Jepang di

¹ The "Comfort Women" Controversy: History and Testimony." *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*. <https://apjff.org/-Yoshiko-Nozaki/2063/article.html>, diakses 24 Januari 2020.

kawasan Asia tersebut, merupakan dalam rangka membebaskan Asia Timur dari sistem penjajahan barat, sehingga dapat berkembang di bawah perlindungan Jepang yang berasaskan semangat persaudaraan dan solidaritas. Dengan dimilikinya prinsip tersebut, tentara militer Jepang berperang demi terwujudnya ambisi tersebut dan kekuasaan baru di Asia.²

Sebelum perang saudara yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara, wilayah Korea disebut dengan Semenanjung Korea dan dibawah kepemimpinan Kerajaan Dinasti Lee. Namun pada tahun 1910, Kekaisaran Jepang berhasil menduduki Semenanjung Korea dan berhasil menggulingkan Kerajaan *Joseon*.³ Dengan mengadakan perjanjian *Japanese – Korean Annexation Treaty* yang menyatakan bahwasanya Kekaisaran Jepang mengambil alih Semenanjung Korea, menjadikan bagian dari Jepang dan juga merupakan jajahan Jepang. Lalu sejak saat itu, Kekaisaran Jepang menguasai seluruh hak dan fungsi politik Semenanjung Korea, baik itu politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Kekuasaan Kekaisaran Jepang di Semenanjung Korea terjadi sejak tahun 1910 hingga tahun 1945 dan kekuasaan tersebut dilakukan dikarenakan Jepang ingin menjadikan wilayah Korea Selatan sebagai wilayah penyangga atau *buffer zone*, yaitu untuk menghadapi kekuatan Rusia di Asia Timur dan menjadikan Korea sebagai pangkalan militer untuk melakukan agresi ke daratan Tiongkok.⁴

² *Ibid.*

³ Kingston, Jeff. Review of *Denying the Comfort Women: The Japanese State's Assault on Historical Truth* ed. by Nishino Rumiko, Kim Puja, and Onozawa Akane. *Monumenta Nipponica* 74, no. 1 (2019): 150. doi:10.1353/mni.2019.0008.

⁴ International Society for Educational Information. *Japan in Modern History: High School Vol. I*. Tokyo: International Society for Educational Information. Inc. (1995), 362.

Setelah Kekaisaran Jepang menguasai Semenanjung Korea selama 35 tahun lamanya, pada tahun 1945, Kekaisaran Jepang pada akhirnya mengalami kekalahan dalam perang. Kemudian kekalahan tersebut membuat Jepang melepaskan Semenanjung Korea dari kekuasaannya. Selama Korea Selatan terlepas dari jajahan Jepang, hubungan diplomasi kedua negara belum ada kemajuan. Ketika Presiden Park Chung Hee memimpin Korea Selatan pada tahun 1961, hubungan diplomasi dengan Jepang pun akhirnya mengalami kemajuan. Kepribadian Park Chung Hee yang mengagumi Jepang karena kekuatannya sebagai negara modern, membuat pemerintahan Korea Selatan mengadopsi model pembangunan era Meiji pada Korea Selatan, yang disebut dengan *japanophile* yaitu pembangunan ekonomi melalui perusahaan kapitalis.⁵ Walaupun Park Chung Hee merupakan seseorang yang nasionalis, tetapi beliau mempelajari pola kebijakan pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II dan mengadopsikan kebijakan yang sama pada Korea Selatan. Sehingga hubungan diplomatik yang dibangun oleh Korea Selatan dan Jepang terjadi pada tanggal 22 Juni 1965.⁶

Hubungan diplomatik dari Jepang dan Korea Selatan ditandai dengan ditandatanganinya *The 1965 Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea* yang isinya merupakan dasar dari hubungan diplomasi Jepang dan Korea Selatan. Perjanjian antara kedua negara mengenai penyelesaian masalah dan hal lainnya, seperti yang berkaitan dengan klaim dan properti, serta kerjasama

⁵ Hellmann, Donald C. "Japan and Korea: The Political Dimension. By Chong-Sik Lee. Stanford: Hoover Institution Press, (1985), 225." *The Journal of Asian Studies* 48, no. 3 (1989), 638. doi:10.2307/2058691.

⁶ *Ibid.*, hlm. 639.

ekonomi juga turut ditandatangani. Walaupun Jepang dan Korea Selatan telah membangun hubungan diplomatiknya dan Jepang sudah memberikan kompensasi dana bagi Korea Selatan, namun luka yang dirasakan oleh Korea Selatan akibat penjajahan Jepang masih belum sepenuhnya hilang, bahkan setelah tiga dekade dari hubungan diplomatik kedua negara terjadi.⁷

Larangan masuknya kebudayaan Jepang ke Korea Selatan merupakan faktor dari lahirnya sentimen masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang. Luka yang dirasakan oleh masyarakat Korea Selatan diakibatkan oleh dilarangnya penggunaan bahasa dan huruf Korea pada masa penjajahan Jepang. Larangan tersebut pada awalnya terbentuk setelah berakhirnya penjajahan Jepang di Korea. Tetapi pemerintah Korea Selatan tetap melarang masuknya budaya Jepang, seperti siaran dan distribusi catatan sejarah yang berhubungan dengan Jepang, *video*, kaset, serta permainan yang berasal dari Jepang. Maka dari itu Korea Selatan tidak memiliki akses yang legal atas media dan kebudayaan Jepang hingga tahun 1998.⁸

Kemudian diikuti oleh penurunan hubungan bilateral dalam bidang politik, penyebabnya yaitu karena tidak adanya saling pengertian antara kedua negara mengenai permasalahan latar belakang sejarah dan teritorial. Penyebabnya yaitu karena penandatanganan *Treaty on Basic Relations* 1965 tidak menyelesaikan permasalahan sejarah dan sengketa teritorial antara kedua negara. Perjanjian yang seharusnya berfungsi sebagai memperbaiki hubungan bilateral antara Jepang dan

⁷ Egler, David G. "The Japanese Wartime Empire, 1931–1945." *History: Reviews of New Books* 25, no. 3 (1997), 134. doi:10.1080/03612759.1997.9952840.

⁸ Suzuki, Hitoshi. "IIST WORLD FORUM Ban Lifted on Japanese Popular Culture in South Korea" https://www.cfiec.jp/wf/magazine/0241/0241_E.html, diakses 21 Maret 2020.

Korea Selatan ini, tidak mencakup permintaan maaf yang tulus dari Jepang atas perbuatannya terhadap Korea Selatan pada masa penjajahan Jepang. Ketentuan yang ditawarkan Jepang kepada Korea Selatan sebesar 800 juta USD selama sepuluh tahun pun merupakan bagian dari persetujuan mengenai kerjasama ekonomi, bukan sebagai ganti rugi atas kesalahan Jepang pada masa penjajahan.⁹

Penurunan hubungan bilateral ini pun antara lain terjadi pada tahun 1995 ketika anggota kabinet Jepang Takami Eto, melontarkan pernyataan kontroversial mengenai kolonialisasi Kekaisaran Jepang di Semenanjung Korea sebenarnya membawa untung bagi pihak Semenanjung Korea. Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik keras oleh masyarakat Korea Selatan. Lalu adapun permasalahan yang terjadi pada tahun 1997 ketika Jepang secara sepihak menghapus perjanjian dalam kerjasama sektor perikanan antara kedua negara dan pada tahun 2005 ketika Prefektur Shimane di Jepang mendeklarasikan adanya *Takeshima Day* untuk merayakan peringatan 100 tahun aneksasi Jepang yang berlokasi di Kepulauan Dokdo, Takeshima.¹⁰ Sikap dari Jepang yang menimbulkan permasalahan-permasalahan tersebut membuat luka yang ada dalam masyarakat Korea Selatan semakin dalam, begitu juga dengan sentimen-sentimen negatif yang muncul pun semakin kuat.

Mayoritas masyarakat Jepang menganggap bahwa Korea Selatan cenderung memilih meningkatkan hubungannya dengan Tiongkok dibandingkan dengan

⁹ Takahara Akio, "Forty-four Years of Sino-Japanese Diplomatic Relations Since Normalization," *China-Japan Relations in the 21st Century*, 2017, 27, doi:10.1007/978-981-10-4373-4_2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

Jepang. Sementara itu, banyak masyarakat Korea Selatan yang menganggap bahwa Jepang masih belum menyatakan permintaan maaf secara tulus mengenai penjajahan yang dilakukan Jepang pada tahun 1910 – 1945. Padahal pemerintah Jepang telah berulang kali melakukannya. Meskipun kedua negara merasa perlu untuk meningkatkan hubungan bilateralnya, namun masih sedikit kepercayaan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Korea Selatan dan Jepang.¹¹

Kebijakan dan perlakuan-perlakuan Jepang pada masa kekuasaan Jepang di Korea Selatan selama 35 tahun lamanya, meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Korea Selatan dan sentimen masyarakat dari kedua negara. Bahkan sentimen anti Jepang pun juga ditemukan di kalangan muda masyarakat Korea Selatan, yang bisa dibilang tidak terlibat dalam era penjajahan Jepang. Mayoritas masyarakat Jepang juga beranggapan bahwa sentimen mereka terhadap Korea Selatan dikarenakan kritik dan protes yang diajukan secara terus menerus oleh Korea Selatan terhadap Jepang, terkait dengan okupasi yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan pada masa penjajahan Jepang. Sebagai negara yang demokratis, opini masyarakat tentunya berpengaruh bagi kebijakan kedua negara.¹²

1.2. Identifikasi Masalah

Meskipun Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki berbagai persamaan nilai dan budaya, adanya sentimen anti Jepang di Korea Selatan dapat mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara. Sebagai negara yang

¹¹ Tamaki, T., "Taking the 'taken-for-grantedness' seriously: problematizing Japan's perception of Japan-South Korea relations," *International Relations of the Asia-Pacific* 4, no. 1 (2004): 148, doi:10.1093/irap/4.1.147.

¹² *Ibid.*, hlm. 152.

memiliki pengaruh cukup besar di kawasan Asia Pasifik, hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan termasuk penting terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan, akan tetapi kedekatan geografis serta persamaan nilai dan budaya yang dimiliki kedua negara tidak menjamin terus berjalannya hubungan bilateral antar kedua negara.¹³

Sebaliknya, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan sering kali mengalami ketegangan, dan salah satu faktor utama pemicu ketegangan tersebut adalah permasalahan sejarah. Dampak dari sejarah pahit bagi Korea ini pada akhirnya selalu menjadi hambatan untuk memelihara hubungan baik antara kedua negara. Korea Selatan berusaha menuntut agar pihak Jepang memiliki tanggung jawab akan sejarah yang telah dilakukan oleh Jepang, dengan mengakui sejumlah peninggalan pada zaman perang dan era kolonialisme Jepang terhadap Korea.¹⁴

Masih terkait permasalahan sejarah, hubungan antara Jepang terhadap Korea Selatan juga menegang terkait masalah sengketa teritorial. Dimana munculnya masalah sengketa atas Kepulauan Dokdo, atau oleh Jepang disebut sebagai Kepulauan Takeshima, yang letaknya berada di Laut Jepang. Pada tahun 2012, Presiden Korea Selatan yaitu Lee Myung Bak mengunjungi kepulauan tersebut, dan menimbulkan reaksi kemarahan dari pihak masyarakat Jepang.¹⁵

¹³ TLTC Blogs. "Japan and the Power of an Apology – Journal of Diplomacy." <https://blogs.shu.edu/journalofdiplomacy/2015/09/japan-and-the-power-of-an-apology/>, diakses 4 April 2020.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ David, Roman. "The past or the politics of the present? Dealing with the Japanese occupation of South Korea." *Contemporary Politics* 22, no. 1 (2015), 59. doi:10.1080/13569775.2015.1112953.

Terdapat permasalahan sejarah hubungan Jepang terhadap Korea Selatan yang lain yaitu seperti kunjungan salah satu pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni, upaya pemerintah Jepang untuk merevisi sejarah Jepang, dan permasalahan sistem *comfort women*. Istilah tersebut dalam Bahasa Jepang merupakan *Jugun Ianfu*. *Ju* berarti mengikuti, lalu *gun* artinya tentara atau militer, *ian* yaitu kenyamanan atau hiburan dan *fu* merupakan perempuan. Lebih dari 200.000 perempuan yang sebagian besar berasal dari Asia Timur seperti Jepang, Korea, Vietnam, dan Taiwan. Dari Asia Tenggara yaitu Filipina, Malaysia dan Indonesia dijadikan sebagai budak seks oleh Jepang untuk para tentaranya. Lebih dari 80% perempuan tersebut berasal dari Korea Selatan.¹⁶

Awal dari pembentukan tempat hiburan militer Jepang yaitu pada Maret 1931, ketika Markas Besar Tentara Jepang di Pasifik Selatan memutuskan untuk mendirikan tempat hiburan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Markas Besar Tentara Jepang Pasifik Selatan, yang berada di Rabaul, Papua Nugini meminta kepada Markas Besar Tentara Taiwan untuk mendapatkan budak seks dan mengirim mereka ke Kalimantan. Fakta dari permintaan itu adalah pengiriman 70 orang perempuan budak seks dari Taiwan ke Borneo yang telah memiliki dokumen perjalanan militer dari Kementerian Perang Jepang. Karena terjadi serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1943, membuat para tentara Jepang berubah dari agresif menjadi defensif. Sehingga mempengaruhi sulitnya Jepang untuk mendatangkan budak seks dari Asia Timur dan sebagai

¹⁶ Kingston, Jeff. *Loc.cit.*, hlm. 150.

gantinya, para perempuan di Asia Tenggara terutama di Indonesia, dikirimkan ke garis depan sebagai penghibur atau budak seks.¹⁷

Permasalahan budak seks pertama kali muncul pada akhir 1991 ketika beberapa mantan korban perbudakan seks dari Korea Selatan yang dibantu oleh organisasi perempuan yaitu *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan* mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tokyo untuk menuntut Jepang bertanggung jawab. Tidak hanya dilakukan oleh mantan korban perbudakan seks dan organisasi perempuan, tetapi tuntutan terhadap pemerintah Jepang juga dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan.¹⁸

Jepang dan Korea Selatan memiliki persepsi yang berbeda mengenai permasalahan budak seks. Korea Selatan menganggap masalah perbudakan seks belum selesai, dikarenakan pemerintah Jepang tidak mengakui tanggung jawab hukum terhadap perbuatannya yang kejam pada masa penjajahan Jepang dari tahun 1910 - 1945 dan tidak memberikan kompensasi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan menurut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Desember 2012, permasalahan budak seks telah selesai pada tahun 1965, pada saat Jepang dan Korea Selatan sepakat menjalin kerjasama bilateral dan memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Dengan adanya perjanjian kerjasama bilateral tersebut, pemerintah Jepang menganggap bahwa masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang, termasuk permasalahan

¹⁷ Kim, Mikyoung. "Memorializing Comfort Women: Memory and Human Rights in Korea-Japan Relations." *Asian Politics & Policy* 6, no. 1 (2014), 85. doi:10.1111/aspp.12089.

¹⁸ Hein, Patrick. "Unresolved Comfort Women Issue." *The Korean Journal of International Studies* 14, no. 3 (2016), 447. doi:10.14731/kjis.2016.12.14.3.447.

budak seks, dinyatakan selesai. Namun, pada tahun 1991, permasalahan budak seks muncul hingga tahun 2015, masyarakat dan pemerintah Korea Selatan terus menuntut pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab.¹⁹

Pada tahun 1995, pemerintah Jepang sempat mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan *Asian Women's Fund* yang digunakan sebagai media untuk memberikan bantuan medis dan juga bantuan keuangan kepada para korban budak seks. Tetapi pemerintah Korea Selatan dan para korban serta aktivis, justru mengkritik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan tetap menuntut adanya penyelesaian dan kompensasi secara hukum dan juga moral. *Asian Women's Fund* pun akhirnya ditutup pada tahun 2007 tanpa pencapaian yang signifikan.²⁰

Ketika resmi terpilih sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 2013, Park Geun Hye bahkan menyatakan bahwa ia menolak untuk mengadakan pertemuan formal dengan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe, sebelum Jepang menyatakan permohonan maaf dan pertanggung jawabannya terhadap para korban perbudakan seks di Korea Selatan. Park Geun Hye pun juga tidak sependapat dengan rencana Abe yang akan merevisi *Kono Statement* dan menolak untuk menyelesaikan permasalahan budak seks. Karena sikap Shinzo Abe tersebut, Park Geun Hye tidak bersedia melakukan pertemuan bilateral dengan Abe sejak pertama kali ia menjabat.²¹ Perbedaan persepsi mengenai permasalahan budak seks antara

¹⁹ Kumagai, Naoko, "The Background to the Japan-Republic of Korea Agreement: Compromises Concerning the Understanding of the Comfort Women Issue," *Asia-Pacific Review* 23, no. 1 (2016): 67, doi:10.1080/13439006.2016.1195955.

²⁰ AWF.or.jp. "Projects by Country or Region - South Korea." <https://awf.or.jp/e3/korea.html>, diakses 11 Oktober 2020.

²¹ Kingston, Jeff. *Loc.cit.*, hlm. 155.

Park dan Abe ini telah membuat hubungan diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan pada titik terendah dalam hubungan kedua negara.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah pada diplomasi bilateral Jepang terhadap Korea Selatan, karena adanya hambatan dalam menjalani hubungan diplomasi yang disebabkan oleh Jepang yang enggan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan saat Imperialisme Jepang. Diplomasi bilateral dipilih sebagai fokus utama agar dapat mengetahui upaya - upaya Jepang untuk mempererat hubungan terhadap Korea Selatan.

Alasan permasalahan *comfort women* dipilih karena adanya ketidaksesuaian paham antara Jepang dan Korea Selatan dalam penyelesaian masalah perbudakan seks. Jepang menganggap masalah perbudakan seks sudah selesai ditangani, tetapi Korea Selatan menilai permasalahan budak seks masih belum selesai dan masih ada korban yang belum mendapatkan kompensasi dari pemerintah Jepang, sehingga mempengaruhi hubungan bilateral Jepang dengan Korea Selatan.

Tahun yang dipilih yaitu tahun 2015, karena merupakan terbentuknya Kesepakatan Perbudakan Seks pada 28 Desember 2015 yang dilakukan oleh Jepang sebagai upaya permintaan maaf dan untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan, hingga 2018 ketika pergantian pemerintahan dari Korea Selatan secara sepihak mengakhiri kesepakatan pada 9 Januari 2018.

1.2.2. Perumusan Masalah

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu “**Bagaimana Diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam permasalahan *Comfort Women*?**”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam permasalahan *comfort women* pada tahun 2015 - 2018.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berbasis diplomasi ini, diharapkan dapat berguna sebagai referensi studi Ilmu Hubungan Internasional dan dapat menambah wawasan bagi siapapun yang membaca penelitian ini. Lalu adapun penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat utama dalam kelulusan Sarjana Studi Ilmu Hubungan Internasional. Diharapkan pula dari penelitian ini, dapat mengedukasi pembaca mengenai salah satu faktor ketegangan hubungan diplomatik Jepang terhadap Korea Selatan hingga saat ini, yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap perempuan-perempuan Korea Selatan pada Perang Dunia II.

1.4. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengkaji literatur berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Terdapat empat artikel yang akan dikaji, dimana artikel-artikel tersebut mempunyai pandangan berbeda mengenai diplomasi yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan dalam penyelesaian masalah perbudakan seks. Artikel yang pertama yaitu berjudul “*Unresolved Comfort Women Issue: How Pragmatism Precludes Reconciliation*” yang ditulis oleh Patrick Hein (2016). Hein mengatakan bahwa permasalahan budak seks yang dilakukan oleh pasukan militer Jepang pada Perang Dunia II terhadap korban perempuan di Korea Selatan merupakan bukan sekedar isu yang bersifat domestik saja. Permasalahan budak seks dianggap sudah melampaui hingga pelanggaran hak asasi manusia dan juga berdampak terhadap hubungan diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan. Hein pun menyebutkan bahwa dalam pemerintahan Shinzo Abe, permasalahan budak seks dipengaruhi oleh pendekatan Abe terhadap sebuah isu yang bersifat pragmatis. Dimana sebuah permasalahan harus diselesaikan secara praktis. Tidak memandang norma maupun prinsip yang ada. Jika kaitannya dengan negara, maka harus diselesaikan secara hubungan diplomatik. Sehingga kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan budak seks yang dilakukan oleh Abe dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye pada Desember 2015, dianggap merupakan sekedar penyelesaian hubungan diplomatik semata. Tidak menyelesaikan masalah sampai pada akhirnya, yaitu dengan cara mengunjungi para korban dari perbudakan seks di Korea Selatan.²²

²² Hein, Patrick. *Loc.cit.*, hlm. 447.

Artikel dari Hein memaparkan bahwasanya dalam pemerintahan Abe, di dalam buku teks sejarah Jepang, tidak ada pembahasan mengenai permasalahan budak seks. Sehingga masyarakat terutama para pelajar tidak mengetahui lebih dalam mengenai isu ini. Dampak terhadap permasalahan budak seks menjadikan opini yang dikemukakan oleh Abe akan langsung mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat, dikarenakan tidak mendapatkan edukasi lebih dalam terhadap permasalahan budak seks.²³ Maka dari itu, artikel ini termasuk kontra dengan pendekatan Abe yang bersifat pragmatis terhadap permasalahan budak seks.

Artikel yang kedua yakni berjudul “*Settlement Without Consensus: International Pressure, Domestic Backlash, and the Comfort Women Issue in Japan*” ditulis oleh Ji Young Kim dan Jeyong Sohn (2017). Artikel ini memaparkan bahwa terdapat tekanan yang berasal dari eksternal yaitu Presiden Amerika Serikat George Bush pada Maret 2007 meminta Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk memberikan pernyataan maaf secara tulus kepada para korban permasalahan budak seks. Abe pun melakukan permintaan maaf didepan Bush. Selain tekanan dari Presiden Amerika George Bush, ketika kedua kalinya Shinzo Abe dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 2012, tekanan datang yang berasal dari NGOs, yaitu *United Nations Committee Against Torture* dan *United Nations Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* untuk merekomendasi Abe meminta maaf secara langsung kepada para korban permasalahan budak seks. Disisi lain, terdapat tekanan yang berasal dari internal yang mempunyai pandangan berbeda dari eksternal. Dimana para kelompok elit

²³ *Ibid.*

dan nasionalis lebih mementingkan pemerintahan Abe dibandingkan dengan permasalahan budak seks yang dianggapnya merupakan sejarah belaka. Yang kemudian membuat kelompok elit dan nasionalis ini fokus pada pembenahan ulang buku sejarah dan juga media yang membahas mengenai permasalahan budak seks. Yang pada akhirnya pada Agustus 2016 setelah melakukan perjanjian antara Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengenai penyelesaian permasalahan budak seks, Pemerintahan Jepang mendonasikan sebanyak 8,5 juta USD untuk membangun Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan. Dimana perjanjian dan donasi yang dilakukan antara Jepang dan Korea Selatan ini dilakukan semata-mata hanya untuk memepererat hubungan diplomatik saja dan bagian dari strategi politik luar negeri Jepang, bukan menyelesaikan permasalahan hingga akarnya.²⁴ Kesimpulan dari artikel yang kedua yaitu artikel ini membahas mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang mendorong Shinzo Abe untuk melakukan permintaan maaf kepada para korban perbudakan seks di Korea Selatan.

Lalu artikel ketiga merupakan *Walking the Long Road in Solidarity and Hope: A Case Study of the "Comfort Women" Movement's Deployment of Human Rights Discourse* oleh Cheah Wui Ling. Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) telah mampu membentuk sebuah gerakan dan solidaritas perbudakan seks sebagai gerakan transnasional. Gerakan perbudakan seks telah menjadi gerakan sosial yang mampu membentuk jaringan transnasional yang menghubungkan berbagai badan

²⁴ Kim, Ji Y., and Jeyong Sohn. "Settlement Without Consensus: International Pressure, Domestic Backlash, and the Comfort Women Issue in Japan." *Pacific Affairs* 90, no. 1 (2017), 78. doi:10.5509/201790177.

organisasi lokal untuk memfasilitasi kerjasama antar lintas batas negara. Faktor yang menghambat gerakan perbudakan seks dalam memperjuangkan hak korban adalah pertama terdapat kontra pandangan antara pihak Jepang yang memandang masalah perbudakan adalah sebuah praktik kolonialisme yang tidak bisa dihindari. Disisi lain, kontra-narasi dari pandangan gerakan perbudakan seks menggunakan pandangan HAM sebagai sebuah kejahatan perang. Kemudian ada sentimen yang muncul dari budaya, rasa, gender dan kelas yang menyebabkan banyak dari korban memilih untuk menyimpan kisah pilunya karena takut dipandang negatif oleh publik dan dirasa selalu dihambat oleh kepentingan politik dan ekonomi dari pihak Jepang dan Korea Selatan. Dimana Jepang dan Korea Selatan melakukan perjanjian pemulihan hubungan karena ada kepentingan politik dan kerjasama ekonomi, sedangkan permasalahan perbudakan seks cenderung tidak menjadi pembahasan utama dan dikesampingkan.²⁵

Artikel yang terakhir yaitu "*The 'comfort women' issue and the embedded culture of sexual violence in contemporary Japan.*" oleh Muta Kazue (2016). Dalam artikel ini, menyatakan bahwa salah satu hambatan dari penyelesaian permasalahan perbudakan seks yaitu budaya *seksisme* dan *misogini* dari masyarakat Jepang yang turut dibuktikan oleh hukum yang masih tumpul jika korbannya merupakan perempuan, tingginya tingkat konsumsi konten porno dan mitos mengenai pemerkosaan bahwa kesalahan selalu berasal dari korban. Sentimen ini pun kemudian diperkuat dengan bukti bahwa masyarakat Jepang, secara tidak langsung setuju bahwa apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe

²⁵ Ling, Cheah. "Walking the Long Road in Solidarity and Hope: A Case Study of the "Comfort Women"" *Movement's Deployment of Human Rights Discourse*. (2013): 80.

mengenai tidak adanya bukti nyata atas laporan permasalahan budak seks dan yang dilakukan oleh militer Jepang kepada para korban perbudakan seks merupakan kewajiban mereka sebagaimana yang dijalankan oleh para militer pada umumnya. Tentunya hal ini bertentangan dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang Kono Yohei pada tanggal 4 Agustus 1993, bahwa Yohei mengakui adanya permasalahan budak seks yang merupakan kesalahan dari militer Jepang ketika Perang Dunia II.²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa artikel yang terakhir memfokuskan kepada salah satu penyebab utama yang membuat masyarakat Jepang belum sepenuhnya sadar akan permasalahan budak seks dan membuat hubungan diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan menjadi tegang.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam penyelesaian masalah perbudakan seks. Menurut Patrick Hein, pemerintah Jepang berdiplomasi terhadap Korea Selatan semata-mata untuk hubungan diplomatik saja. Sedangkan Ji Young Kim dan Jeyong Sohn mengatakan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan Jepang dikarenakan adanya tekanan dari pihak luar yaitu Amerika Serikat. Lalu ada Cheah Wui Ling yang memaparkan bahwa diplomasi permintaan maaf yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan, hanya demi kepentingan politik dan kerjasama ekonomi. Artikel terakhir yaitu dari Muta Kazue menyinggung bahwa sebenarnya pemerintah Jepang menganggap permasalahan perbudakan seks belum mempunyai bukti-bukti yang kuat.

²⁶ Kazue, Muta. "The 'comfort women' issue and the embedded culture of sexual violence in contemporary Japan." *Current Sociology* 64, no. 4 (2016), 620-636.
doi:10.1177/0011392116640475.

Sehubungan dengan beberapa tinjauan pustaka yang sudah dilakukan, mayoritas penelitian mengenai diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan hanya sebatas sampai permohonan maaf dan permasalahan budak seks diselesaikan melalui Kesepakatan Perbudakan Seks pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut memang merupakan puncak dari diplomasi Jepang, tetapi penting juga untuk diteliti bagaimana kelanjutan dari diplomasi yang dilakukan oleh Jepang setelah kesepakatan dilakukan, mengingat bahwa terdapat beberapa peristiwa yang sudah terjadi, yaitu masih adanya perbedaan dalam masyarakat Jepang dan Korea Selatan dalam memandang perbudakan seks dan adanya pergantian pemerintahan di Korea Selatan, sehingga berdampak kepada upaya Jepang untuk memperbaiki hubungan kerjasama dengan Korea Selatan.

Melihat belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan setelah Kesepakatan Perbudakan Seks terjadi tahun 2015, maka penelitian ini akan mengisi kekosongan dengan melakukan analisis yang berfokus pada upaya-upaya diplomasi bilateral Jepang terhadap Korea Selatan, dimulai saat Kesepakatan Perbudakan Seks dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan pada 25 Desember 2015, hingga 9 Januari 2018 ketika pemerintahan Korea Selatan yang baru secara sepihak membatalkan kesepakatan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Konsep **politik luar negeri** merupakan perpaduan dari serangkaian norma, nilai, pedoman perilaku dan cita-cita suatu bangsa yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan atau kepentingan yang harus diperjuangkan secara total oleh para

utusan negara. Para utusan negara ini memiliki komitmen yang bersifat strategis, artinya sebelum melakukan berbagai tindakan atau keputusan dalam kerjasama internasional, maupun memberi respon terhadap berbagai tindakan atau permintaan dari negara lain harus memiliki pedoman, sehingga dapat menghindari perbedaan kepentingan antar negara.²⁷

Interaksi antar aktor negara maupun non-negara dilakukan demi memenuhi kepentingannya masing-masing. Interaksi ini pun kemudian akan menyebabkan ketergantungan dari satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam konteks negara, hal tersebut merupakan diplomasi. Konsep **diplomasi** merupakan dari komunikasi atau kerjasama antar sejumlah pihak yang dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan.²⁸

Diplomasi pun dilakukan oleh suatu negara demi memenuhi kepentingan nasional negara, yang kemudian menjadi instrumen dari politik luar negeri. Diplomasi pada hakikatnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah di mana tujuan pemerintah saling bertentangan atau untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintah negara lain melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman.²⁹

Interaksi antar negara biasanya dilakukan antar dua aktor yaitu diplomasi bilateral maupun lebih, yakni diplomasi multilateral. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan diplomasi bilateral. Pada **diplomasi bilateral**, kerjasama antar dua

²⁷ Weisbrode, Kenneth. "Diplomacy in Foreign Policy." In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. (2017).

²⁸ Kissinger, Henry. "Diplomacy." *New York: Simon & Schuster*, (2012), 7.

²⁹ Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi antara teori & praktik*. (2008): 4.

negara biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Sistem dari diplomasi bilateral ini cenderung mempunyai fleksibilitas yang lebih luas, karena lebih mudah mencapai keputusan yang diinginkan. Selain itu, negosiasi pada tingkat bilateral dirasa akan lebih mudah dicapai, karena negosiasi pada sistem ini disesuaikan hanya dengan kebutuhan dari kedua negara yang terlibat.³⁰ Proses negosiasi dalam diplomasi bilateral dilakukan langsung oleh aktor dalam pemerintah negara, meliputi pemimpin negara, Menteri Luar Negeri, dan diplomat³¹, dengan melakukan upaya pendekatan seperti penandatanganan kesepakatan, pertukaran perwakilan negara, dan kunjungan kenegaraan.³² Aktor negara akan melakukan hubungan dengan negara lain untuk memperbaiki hubungan mereka, terutama jika terdapat konflik atau ketegangan.

Maka jika negara berkonflik dengan negara lain, tentu diperlukan permintaan maaf dari negara yang bernegosiasi. Permintaan maaf yang dilakukan ini pun termasuk kedalam konsep **diplomasi permintaan maaf**. Dimana konsep ini merupakan permintaan maaf yang dilakukan secara kolektif yang didasarkan dengan adanya kepentingan politik antar negara, dan melalui representasi yang telah ditunjuk oleh negara untuk membuka jalur komunikasi dan permintaan maaf secara formal.³³ Konsep dari diplomasi permintaan maaf biasanya dilakukan dalam hubungan bilateral antar negara, dimana negara yang menyebabkan permasalahan mempunyai tanggung jawab dan negara yang dirugikan pun menerimanya demi

³⁰ *Ibid*, hlm. 134.

³¹ *Ibid*, hlm. 65.

³² *Ibid*, hlm. 85.

³³ Bagdonas, Ažuolas. "Historical State Apologies." *The Palgrave Handbook of State-Sponsored History After 1945*, (2018): 780. doi:10.1057/978-1-349-95306-6_42.

memenuhi kepentingan negaranya. Selain itu, faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan diplomasi permintaan maaf dalam hubungan bilateral yaitu kekhawatiran yang timbul mengenai kehormatan, kredibilitas, dan nama baik posisi negara dalam sistem internasional.³⁴

Terminologi yang terakhir yaitu *comfort women*. *Comfort women* merupakan terjemahan dari *Ianfu (Jugun Ianfu)* atau perbudakan seks, sebuah istilah yang digunakan oleh pemerintah Jepang selama Perang Dunia II. *Comfort women* dipakai untuk menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kenyamanan atau menjadi perempuan penghibur bagi tentara Jepang di lokasi tertentu yang dikenal sebagai Rumah Bordil Militer atau *comfort station*. Rumah Bordil Militer merupakan sebuah tempat asusila yang dibangun oleh militer Jepang selama Perang Dunia II. Perempuan-perempuan yang menjadi budak seks merupakan korban kekerasan seksual dan pemerkosaan selama Perang Dunia II terjadi.³⁵

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu untuk mengeksplorasi makna baru dari fokus masalah yang dipilih. Tipe dari penelitian yang dipilih merupakan deskriptif analisis, dimana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang akan dicoba oleh peneliti untuk

³⁴ *Ibid.*, hlm. 781.

³⁵ Shunich Takekawa. "The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan." *The Review of Korean Studies* 19, no. 1 (2016): 250. doi:10.25024/review.2016.19.1.009.

dianalisis hingga tuntas secara rasional. Peneliti juga mempunyai peran yaitu sebagai pengumpul dan penganalisis data dari penelitian ini.³⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari sumber sekunder yaitu buku, artikel, literatur, seta pemberitaan yang dipublikasikan melalui internet. Adapun keabsahan dari data-data yang diambil diperdalam kembali oleh peneliti menggunakan triangulasi, yakni menggunakan beberapa sumber dan teori.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan membagi pembahasan menjadi 4 bab, yaitu:

Bab I membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas sejarah hubungan Jepang terhadap Korea Selatan, mengerucut kepada okupasi sistem *comfort women* Jepang di Korea Selatan, dilanjutkan bagaimana sikap pemerintah Jepang sebelum dan pada masa pemerintahan Shinzo Abe, adanya perbedaan pandangan dari masyarakat Jepang dan Korea Selatan, serta faktor - faktor yang mendorong Jepang untuk berdiplomasi terhadap Korea Selatan.

Bab III menganalisis diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam permasalahan *comfort women*, yang diawali dengan meminta maaf dan menandatangani kesepakatan pada tahun 2015, lalu dilanjutkan dengan menolak

³⁶ Laura Maruster, "Qualitative Research Methods", *Thousand Oaks: SAGE*, (2013).

tuntutan kembali yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan desakan untuk merelokasi patung *comfort women* di Busan, dan terakhir bekerjasama dengan media massa di Jepang dan Korea Selatan.

Bab IV kesimpulan.